

EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KAMPUNG DI DISTRIK SILIMO KABUPATEN YAHUKIMO PROVINSI PAPUA

MUSA MATUAN

Burhanuddin. Kiyai

Alden Laloma

ABSTRACT

This study departs from the phenomenon that the villages in the district governance Silimo indicated Yahukimo Papua Province has not been effective . This condition seems to be related to several factors inhibiting . Thus , this study aims to : (1) To determine the effectiveness of village governance ; and (2) . To determine the factors inhibiting the achievement of effective governance at the village Silimo District Yahukimo .

This study used a qualitative approach to the application of descriptive methods . Data and information gathered through interviews with 16 informants techniques , and equipped with observation and documentation , then analyzed by applying descriptive analysis techniques .

Based on the analysis of data , it is known that : Implementation of the village administration . Particularly in Silimo District Yahukimo generally not effective . This condition can be seen from the reality of the interview in which the criteria for effectiveness penyelenggaraan village administration has not been implemented to the maximum .

Thus , it can be concluded that there is some obstacle , namely : low accessibility factors , quantity and quality of human resources village government officials are inadequate , infrastructure and government facilities were inadequate , and still strong patriarchal values that characterize the activity of the community , especially government officials village that gave birth to the paternalistic culture as inhibitors of achieving effectiveness village governance

Therefore , it is suggested that regional governments need to reform Yahukimo in several sectors , among others : land transportation network , infrastructure , equipment , facilities and budget supporting the delivery of village governance , improving the quality and quantity of resources and village government officials to build a culture system oriented achievement through religious guidance .

Keywords : Effectiveness , Government , Village

PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan memberikan kesempatan dan keleluasan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Karena itu, implementasi pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 antara lain menyatakan bahwa pembagian daerah atas daerah besar dan daerah kecil dengan

bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang (Anonymous, 1945).

Berdasarkan ketentuan pasal 18 UUD 1945 tersebut, maka sistem pemerintahan telah memberikan keleluasan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Hal ini kemudian diterjemakan ke dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang selanjutnya menjadi acuan atau pijakan berbagai daerah yang ada di Indonesia

dalam menyelenggarakan pemerintahan daerahnya.

Menurut azas otonom daerah, terutama penyelenggaraan azas desentralisasi dan tugas pembantuan, bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat daerah melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah, dengan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dan keistimewaan atau kekhususan daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Salah satu terobosan pemerintah dalam mensinergikan sistem atau tatanan pemerintahan yang ada di Indonesia yaitu dengan melakukan semua restrukturisasi dalam regulasi otonomi daerah. Hal itu melalui UU No. 32 Tahun 2004 dan secara spesifik tentang desa diterjemahkan dalam peraturan Pemerintah (PP) No. 72 Tahun 2005 yang nantinya lebih secara teknis membahas tentang konsep berotonomisasi dalam meningkatkan pembangunan pada kawasan pedesaan.

PP No. 72 Tahun 2005 merupakan salah satu instrumen dalam menunjang efektivitas pemerintahan desa yang berbasiskan otonomi daerah, dan secara spesifikasi peraturan pemerintah ini mengatur tentang berbagai aktivitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kampung. Selain itu, cita-cita atau semangat dalam PP No. 72 tahun 2005 di mana terjadinya keseimbangan dalam pelaksanaan antara pemerintah dan masyarakat yaitu terwujudnya otonomi desa yang murni, sejati dan mandiri.

Tujuan dari pada pembangunan desa yang diformulasikan seharusnya diarahkan pada pemberdayaan desa dan pemberdayaan masyarakat tingkat lokal (desa). Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (UU Otsus Papua) ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 yang memberikan kewenangan yang lebih luas kepada Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Hal ini ditekankan pada pasal 1 huruf b, bahwa Otonomi Khusus adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua.

Melalui UU. No. 21/2001 tersebut, Provinsi Papua yang kemudian dimekarkan menjadi Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2008, diamantkan tanggung jawab yang lebih besar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengaturan pemanfaatan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Papua sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Undang-undang ini juga memiliki semangat rekonsiliasi dan penyelesaian masalah yang ada di Provinsi Papua secara menyeluruh, serta memberikan pengakuan dan penghormatan atas hak-hak dasar orang asli Papua serta pemberdayaannya secara strategis dan mendasar.

Berlakunya Undang-Undang Otonomi membuka kesempatan kepada setiap daerah untuk mengembangkan daerahnya dan mendapatkan hak otonomi seperti membentuk provinsi baru, kabupaten atau kota baru, membentuk kecamatan baru dengan melepaskan diri dari kabupaten, atau kecamatan induknya. Salah satu contohnya yaitu adanya pemekaran kecamatan di Kabupaten Yahukimo yang semula berjumlah 9 (sembilan) kecamatan setelah adanya pemekaran menjadi 51 (lima puluh satu) kecamatan/distrik. Banyak kalangan meragukan apakah dengan adanya otonomi daerah maka dengan sendirinya pemerintahan daerah akan memberikan layanan yang lebih baik dan efektif atau malah sebaliknya.

Realitas hasil pengamatan sementara menunjukkan bahwa sampai dengan saat ini, sejak diimplementasikannya UU otonomi khusus Papua, status empat desa atau kampung yang ada di Distrik Silimo belum mengalami perkembangan yang signifikan. Hal ini diindikasikan dengan tingkat perkembangan desa/kampung yang masih berada pada tingkat perkembangan desa/kampung swadaya, yang dicirikan dengan daerahnya terisolir dengan daerah lainnya, jarak antara Dekai (Ibu Kota Kabupaten Yahukimo) dengan Distrik Silimo) selama ± 15 hari berjalan kaki, karena belum tersedia sarana dan prasarana transportasi darat; penduduknya sangat jarang; mata pencaharian homogeny yang bersifat agraris; bersifat tertutup; masyarakat memegang teguh adat;

teknologi masih rendah; sarana dan prasarana sangat kurang; hubungan antar manusia sangat erat; Pengawasan sosial dilakukan oleh keluarga; Kelembagaan desa/kampung belum berfungsi secara efektif; Relatif rendahnya kualitas sumber daya manusia, baik masyarakat maupun aparat pemerintahan desa/kampung dan lambannya percepatan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan Desa menuju tingkat kemandiriannya

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Sesuai dengan sifat dan karakteristik permasalahannya, maka penelitian ini menggunakan metode deskriptif (Nazir, 1988; Koentjaraningrat, 1997). Metode ini digunakan karena peneliti ingin mengungkap permasalahan yang sifatnya aktual dan faktual, juga bertujuan untuk mengungkapkan dan menggambarkan gejala-gejala sosial yang berkaitan dengan fokus masalah dalam penelitian ini.

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini hanya melibatkan satu variabel atau konsep tunggal, yaitu efektivitas penyelenggaraan pemerintahan kampung (desa) dalam wilayah kecamatan atau distrik silimo kabupaten yahukimo. Efektivitas penyelenggaraan pemerintahan kampung dimaksudkan adalah mendeskripsikan sejauh mana efektivitas yang dicapai oleh pemerintah kampung dalam proses penyelenggaraan pemerintahan kampung/desa di wilayah

distrik silimo, yang meliputi kegiatan-kegiatan dibidang pemerintahan, pembangunan dan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat kampung (desa).

C. Informan

Informan dalam penelitian ini diambil dari beberapa unsur, yaitu unsur aparat pemerintah kampung (desa), unsur pengurus dan anggota Badan Musyawarah Kampung (BMK), unsur masyarakat adat Papua yang ada di kampung, dan unsur kelembagaan desa lainnya. Jumlah desa atau Kampung yang ada di distrik silimo Kabupaten Yahukimo sebanyak 4 (empat) kampung, yaitu : Kampung Siloma, kampung Suet, kampung Ermnahom, dan kampung Sudule. Informan ditetapkan sebanyak 16 orang, terdiri dari :

1. Kepala Kampung sebanyak 4 orang
2. Sekretaris Kampung sebanyak 4 orang
3. Ketua Badan Musyawarah Kampung (BMK) sebanyak 4 orang
4. Tokoh adat sebanyak 4 orang.

D. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, terdiri dari :

1. Wawancara: Teknik ini digunakan untuk menjaring data primer. Wawancara dilakukan kepada 16 orang informan yang terdiri dari unsur aparat pemerintah Kampung (desa), unsur pengurus dan anggota Badan Musyawarah Kampung (BMK), dan

unsur masyarakat adat Papua/tokoh masyarakat yang ada di Kampung.

2. Dokumentasi: Teknik dokumentasi digunakan untuk menjaring data sekunder dari berbagai sumber yang terkait, antara lain dari kantor kecamatan/kepala distrik Silimo, dan Kantor Kepala-kepala Kampung yang menjadi sumber informasi dalam penelitian ini.
3. Observasi: Teknik ini digunakan untuk melakukan pengamatan secara langsung terhadap obyek penelitian, dengan maksud memperoleh gambaran empirik disaat penelitian ini dilakukan. Hasil dari observasi ini dapat mempermudah dalam menjelaskan berbagai fenomena yang ada kaitannya dengan permasalahan penelitian ini. Observasi dilakukan, baik di kantor kepala distrik silimo maupun di empat kampung yang ada dalam wilayah distrik silimo.

E. Teknik Analisa Data

Setelah data terkumpul, kemudian dilakukan analisis data dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Editing : Tahap ini merupakan langkah awal dalam menganalisa data setelah peneliti turun lapangan. Dalam rangka awal ini, peneliti memeriksa data yang diperoleh dari sumber data dan informan sehingga apabila terjadi kesalahan dapat dibetulkan. Dengan demikian fungsi dari editing data adalah memeriksa atau mengontrol data yang diperoleh untuk menjamin kemantapan atau validitas data tersebut.

2. Coding data (pemberian kode pada data) : coding adalah kegiatan mengklasifikasi jawaban-jawaban dari informan menurut macamnya, dengan jalan memberi tanda/kode masing-masing jawaban.
3. Reduksi data : Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka dicatat secara teliti dan rinci, karena banyak data, maka harus direduksi. Mereduksi data berarti peneliti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya membuang yang tidak perlu, kemudian melakukan kategorisasi berdasarkan permasalahan yang diteliti.
4. Interpretasi dan pembahasan : Data yang telah dianalisis, kemudian diinterpretasikan sesuai dengan kecenderungan jawaban informan kemudian dibahas secara kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sebagaimana telah dikemukakan pada bagian sebelumnya bahwa efektivitas penyelenggaraan pemerintahan kampung dapat diamati dari 5 (lima) kriteria pokok, yaitu : adaptasi, integrasi, motivasi anggota, produksi atau produktivitas dan manfaat.

Rendahnya capaian efektivitas penyelenggaraan pemerintahan kampung di wilayah Distrik Silimo merupakan konsekuensi dari (1) rendahnya aksesibilitas; (2) terbatasnya sumberdaya

manusia (aparatur pemerintah kampung), baik kuantitas (jumlah) maupun kualitas (mutu) SDM aparat itu sendiri; (3) tingkat ketersediaan sarana-prasarana, peralatan dan fasilitas penunjang serta anggaran yang masih terbatas; (4) masih kentatnya nilai budaya paternalistik.

Terkait dengan aksesibilitas, menurut Tamin (2003:32-33) bahwa aksesibilitas merupakan konsep yang menggabungkan sistem pengaturan tata guna lahan secara geografis dengan sistem jaringan transportasi yang menghubungkannya. Aksesibilitas adalah suatu ukuran kenyamanan atau kemudahan mengenai cara lokasi tata guna lahan berinteraksi satu sama lain dan mudah atau susahnyalokasi tersebut dicapai melalui sistem jaringan transportasi. Faktor yang dapat mempengaruhi tingkat aksesibilitas adalah jarak, waktu tempuh, kondisi prasarana jalan, jaringan jalan, dan layanan transportasi.

Realitas hasil penelitian menunjukkan bahwa lokasi kampung-kampung di wilayah Distrik Silimo sulit dijangkau, kalau tidak dapat dikatakan ‘terpencil’, dimana jarak cukup jauh, waktu tempuh cukup lama (berhari-hari), kondisi prasarana jalan sangat tidak memadai, jaringan jalan belum tersedia, dan layanan transportasi darat belum tersedia kecuali transportasi udara, itupun hanya sampai di ibu kota Kabupaten.

Dengan demikian, dikatakan bahwa aksesibilitas merupakan faktor penghambat pencapaian efektivitas penyelenggaraan pemerintahan kampung, karena aksesibilitas yang lancar merupakan salah satu faktor yang turut menentukan

tingginya mobilitas sosial, di mana penyelenggaraan pemerintahan yang efektif memiliki mobilitas sosial yang sangat tinggi.

Sementara itu, rendahnya mutu dan jumlah sumber daya manusia (aparatus pemerintah kampung) juga merupakan salah satu faktor penghambat pencapaian efektivitas penyelenggaraan pemerintahan kampung, khususnya di wilayah Distrik Silimo Kabupaten Yahukimo.

Kaitannya dengan sumber daya manusia aparatus pemerintah kampung, Notoatmodjo (1992 : 37) mengemukakan bahwa berbicara masalah sumber daya manusia dapat dilihat dari dua aspek, yaitu menyangkut “kuantitas” dan “kualitas”, kuantitas adalah menyangkut jumlah sumber daya manusia (penduduk) sedangkan kualitas menyangkut mutu sumber daya manusia tersebut. Lebih lanjut dijelaskan, bahwa berbicara mengenai kualitas sumber daya manusia juga menyangkut dua aspek yakni aspek fisik (kualitas fisik), dan aspek non fisik (kualitas non fisik) yang menyangkut kemampuan bekerja, berpikir, dan keterampilan-keterampilan lain. Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat diarahkan kepada dua aspek tersebut. Upaya untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia pada kedua aspek tersebut inilah yang dimaksudkan dengan “pengembangan sumber daya manusia”.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah dan mutu sumber daya manusia aparatus pemerintah kampung masih sangat terbatas. Terbatasnya jumlah dan mutu sumber daya aparatus merupakan faktor yang potensial menghambat pencapaian efektivitas penyelenggaraan pemerintahan kampung,

khususnya di wilayah Distrik Silimo Kabupaten Yahukimo.

Faktor terakhir yang diindikasikan sebagai penghambat pencapaian efektivitas penyelenggaraan pemerintahan kampung, khususnya di wilayah Distrik Silimo adalah nilai budaya lokal yang berbasis masyarakat adat Papua. Budaya memiliki arti yang sangat luas dan pemaknaan yang sangat beragam serta merupakan sistem simbol yang dipakai manusia/ masyarakat untuk memaknai hidupnya. Sistem simbol itu berisi orientasi nilai, sudut pandang tentang dunia yang kemudian terekam dalam pikiran yang dapat diaktualisasikan kedalam bahasa tutur, tulisan lukisan sikap, gerak, tingkah laku manusia. (Dwiyanto, 2002 : 85).

Dalam konteks sistem nilai dan adat kebiasaan tersebut maka sudah barang tentu perilaku individu dalam organisasi juga tidak dapat dilepaskan dari pengaruh varian lokalitas budaya yang berkembang begitupun juga birokrasi, termasuk organisasi pemerintahan kampung tidak dapat dilepas dari pengaruh lingkungan nilai budaya dalam aktivitasnya juga secara intensif melalui pola interaksi yang terbentuk didalamnya dengan budaya lokal, budaya birokrasi yang berkembang disuatu daerah tertentu, misalnya dalam masyarakat Papua tidak dapat dilepaskan dari pola budaya lokal serta yang melingkupinya. Demikian halnya yang terjadi pada masyarakat adat Papua yang dalam struktur sosialnya yang biasanya dihargai dan dianggap memiliki kharisma kepemimpinan informal adalah para pemangku adat setempat (lokal).

Sementara itu, dalam budaya kekuasaan tradisional terdapat keyakinan bahwa pimpinan tidak pernah bersalah atau tidak pernah dipersalahkan, apa yang pimpinan lakukan dianggap benar menurut ukuran subjektivitas yang mereka pakai. Konstruksi sosial dan budaya demikian masuk ke dalam birokrasi pemerintahan bahkan dikembangkan menjadi pola interaksi dan hubungan kerja. Secara proporsional, semakin tinggi jabatan seseorang akan semakin berat tanggung jawab yang harus diemban. Akan tetapi logika organisasi tersebut tidak selalu dapat menyalahkan sesuai dengan logika formal yang berkembang dalam birokrasi pelayanan publik. Jika terjadi kesalahan tindakan, aparat bawahan yang selalu menjadi tumpuan kesalahan. Fenomena kultur birokrasi tersebut telah memunculkan raja-raja kecil pada kelompok birokrasi ditingkat bawah, termasuk pemerintahan kampung, yang memperlakukan masyarakat sebagai kelompok yang dapat ditekan dan dikambing hitamkan, masyarakat sering kali dituduh sebagai pihak yang menyebabkan terjadinya kelambanan pelayanan dengan alasan bahwa masyarakat tidak memahami peraturan dan prosedur birokrasi (Dwiyanto, 2002 : 112).

Berangkat dari penjelasan di atas dapat dilihat bahwa hubungan kehidupan simestris dan simbiosis dalam hubungan “bapak dan anak”; artinya dari atas turun menjadi pengayoman, sedangkan yang dibawah harus melakukan pelayanan. Kedua belah pihak saling membutuhkan

dan hidup bersama dengan masyarakat. Bapak (pemangku adat) memberikan sesuatu yang protektif dan bersifat individual sedangkan anak (bawahan, anggota masyarakat) melakukan penghormatan dan loyalitas, sehingga hasil yang nyata dari model budaya birokrasi seperti ini adalah kekuasaan yang makin solid untuk memaksa bawahan tetap tunduk dan loyal kepada pucuk pimpinan.

Melihat model yang ditimbulkan oleh budaya paternalistik diatas, maka oleh Dwiyanto, (2002 : 63) mengambil kesimpulan bahwa rendahnya kinerja birokrasi publik/pemerintah (termasuk efektivitas penyelenggaraan pemerintahan kampung-pen) sangat dipengaruhi oleh budaya paternalisme yang masih sangat kuat, yang cenderung mendorong pejabat birokrasi untuk lebih berorientasi pada kekuasaan dari pada pelayanan, menempatkan dirinya sebagai penguasa.

KESIMPULAN DAN SARAN

a. Kesimpulan

Beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian ini, antara lain sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan pemerintahan kampong khususnya di Distrik Silimo Kabupaten Yahukimo pada umumnya belum berjalan secara efektif. Kondisi ini dapat dilihat dari realitas hasil wawancara di mana ke lima kriteria keefektifan penyelenggaraan pemerintahan kampong belum terimplementasi dengan maksimal.

2. Terdapat beberapa faktor yang turut menyumbangkan kurang efektifnya penyelenggaraan pemerintahan kampung sehingga dapat diidentifikasi sebagai faktor-faktor penghambat, yaitu : faktor aksesibilitas yang rendah, jumlah dan mutu SDM aparat pemerintah kampung yang kurang memadai, sarana-prasarana dan fasilitas pemerintahan yang kurang memadai, serta masih kentalnya nilai budaya paternalistik yang mewarnai aktivitas masyarakat, terutama aparat pemerintah kampung sehingga melahirkan budaya paternalistik sebagai penghambat pencapaian efektivitas penyelenggaraan pemerintahan kampung.

b. Saran

Mengacu pada beberapa temuan dari hasil penelitian ini, maka perlu dikemukakan beberapa saran sebagai solusi dalam memecahkan masalah penelitian ini, di antaranya :

1. Pemerintah daerah Kabupaten Yahukimo untuk mengambil kebijakan, khususnya di bidang pendidikan bagi aparat kampung yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan dan pelayanan publik, khususnya aparat yang berada dalam wilayah Distrik Silimo.
2. Membangun sistem jaringan transportasi yang menghubungkan antara pusat-pemerintahan provinsi dan kabupaten Yahukimo dengan Distrik Silimo agar mempercepat sektor pembangunan.

3. Menyiapkan sarana-prasarana, peralatan, fasilitas pendukung dan anggaran yang memadai untuk pelaksanaan pembangunan Distrik Silimo.
4. Pemerintah daerah memfasilitasi pelatihan dan ketrampilan pemerintahan dan pembangunan bagi aparat Kampung-Kampung Didistrik Silimo.

Daftar Pustaka

- Sanit, Arbi., 1999, "*Format Otonomi Daerah Reformatif*", Makalah Seminar Sehari Ikatan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan, dengan Tema : *Format Otonomi Daerah Masa Depan*, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" – Tanggal 7 April 1999.
- Sharma, R.A.1982, *Organizational Theory and Behaviour*, New Delhi.Tata MC. Graw Hill publishing company Limited.
- Steers Richard. M.. 1985, *Efektivitas Organisasi*, (Terjemahan). Jakarta : Erlangga
- Stoner, L. J, dan C. Wankel., 1989, *Manajemen*, terjemahan Bakowatun Wilhemus, Intermedia, Jakarta.
- Syafrudin, Ateng, 1985, *Titik Berat Otonomi Daerah Pada Daerah Tingkat II*. Bandung : Muja-Muju.
- Syaukani, H. R., 2000, *Menatap Harapan Masa Depan Otonomi Daerah*, Penerbit Gerbang Dayaku, Tenggarong – Kalimantan Timur.-

Tamin, Ofyar Z. 2003. *Perencanaan dan Permodelan Transportasi*, ITB, Bandung.

The Liang Gie, dkk, 1982, *Ensiklopedi Administrasi*, Gunung Agung, Jakarta.

Widarta, 2001, *Cara Mudah Memahami Otonomi Daerah*. Jakarta : Larela Pustaka Utama

Sumber-sumber lain :

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah.-

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.-

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 2007 Tanggal : 16 Mei 2007, Tentang Percepatan Pembangunan Provinsi Papua Dan Provinsi Papua Barat Tahun 2007 - 2009